

WACANA KOLONIAL DALAM NOVEL MAX HAVELAAR: SEBUAH KAJIAN POSKOLONIAL

¹Abu Bakar Ramadhan Muhamad

¹Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember
e-mail: alfi_nh@yahoo.com

Abstrak

Hegemoni kolonialisme dalam budaya poskolonial merupakan alasan penelitian ini kemudian mengkaji wacana kolonial dalam novel *Max Havelaar* (MH) khususnya dampak ditimbulkannya. Dampak dimaksud adalah posisi keberpihakan pemikiran tersirat dari karya tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan, secara temporal maupun permanen MH menyuarakan ketidakadilan dalam kondisi-kondisi kolonial menyangkut penindasan sang penjajah terhadap terjajah. Hanya saja, upaya mengatasnamakan atau mewakili suara kaum terjajah terbukti mengimplikasikan ciri ideologis statis kerangka kolonialisme (orientalisme); yakni cara pandang Eropasentris, di mana “Barat” sebagai *self* adalah *superior*, dan “Timur” sebagai *other* adalah *inferior*. Dalam konteks poskolonialisme, MH dengan sifat kritisnya yang berupaya “menyuarakan” nasib pribumi terjajah, justru menampilkan stigma penguatan kolonialitas itu sendiri secara hegemonik. Artinya, “menyuarakan” nasib pribumi dimaknai sebagai keberpihakan kolonial yang kontradiktif, di mana stigma penguatan kolonialitas justru lebih terasa, ujung-ujungnya melanggengkan hegemoni kolonial. Tidak membela yang terjajah, tetapi memperhalus cara kerja mesin kolonial.

Abstract

The hegemony of colonialism in the culture of postcolonial society is the reason this study then examines the colonial discourse in the novel Max Havelaar (MH) in particular the impact it brings. The impact in question is the implied position of thought in the work. The results of the discussion show that, temporarily or permanently, MH voiced injustice in the colonial conditions regarding the oppression of the colonist against the colonized. However, the effort to name or represent the voice of the colonized has proven to imply a static ideological character in the framework of colonialism (orientalism); ie Eropacentric point of view, in which “West” as self is superior, and “East” as the other is the inferior. In the context of postcolonialism, MH with its critical nature that seeks to “voice” the fate of the colonized natives, actually presents the stigma of strengthening coloniality itself hegemonically. That is, “voicing” the fate of the pribumi is interpreted as a contradictory colonial flare, where the stigma of strengthening coloniality is more pronounced, which ultimately perpetuates the hegemony of colonialism. No longer defending the colonized, but refining the workings of the colonial machinery.

I PENDAHULUAN

Analisis wacana kolonialisme dirintis sebagai sub disiplin akademik oleh Edward Said lewat karyanya *Orientalism* yang terbit pertama kali pada 1978. Orientalisme dipahami sebagai wacana yang memperlihatkan sense perbedaan yang fundamental antara “barat” dan “timur”. Orientalisme adalah penguasaan yang sifatnya hegemonis. Studi orientalisme dan kolonialisme menaruh perhatian pada eksplorasi problem subjektivitas

dan otentisitas di antara kelompok-kelompok sosial dan kebudayaan yang dikucilkan dari wacana kekuasaan. Apa yang dikerjakan Said sangat penting karena menunjukkan wacana, nilai-nilai, dan pola-pola pengetahuan secara jelas mengkonstruksi fakta-fakta.

Said mengadopsi metode yang digunakan Michel Foucault (wacana), menjelaskan bahwa orientalisme itu dibangun lewat konstruksi diskursif. Hal ini mempunyai tiga implikasi teoritis dalam karya Edward Said, yaitu: bahwa (1) ideologi beroperasi tidak saja lewat bentuk kesadaran tapi juga lewat barang praktis material; (2) ada jalinan-jalinan rumit dan kompleks antara politik dan ilmu pengetahuan; bahwa pengetahuan barat, langsung atau tidak langsung adalah bentuk wacana kolonialisme; dan (3) yang paling kontroversial, bahwa orientalisme bersifat "self-generating", dikembangkan oleh dirinya sendiri. Poin penting disini adalah bahwa pengetahuan dari barat, teks-teksnya tidak hanya menciptakan pengetahuan tapi juga berisi deskripsi dari yang tampak dan yang senyatanya terjadi.

Orientalisme, bagi Said, cenderung mengkaji gagasan-gagasan yang konsekuensi metodologisnya merupakan penekanan-penekanan dan bentuk eksekutif dari efektifitas material. Objek kajian Said di sini adalah karya-karya cendikia, karya-karya kesusastraan, jejak-jejak politik, teks-teks jurnalistik, buku-buku perjalanan, serta kajian keagamaan dan filologi. Orientalisme adalah sebuah sistem yang mengutip karya, dan tempat para penulis menyandarkan pola pikirnya mengenai dunia Timur, yang sudah terkonstruksi sebagai sebuah otoritas. Berbeda dengan pandangan Foucault yang menempatkan karya dan penulis perorangan memiliki peran yang sangat kecil dalam pembentukan formasi diskursif, dalam kasus Orientalisme Said menemukan bahwa kenyataan itu tidaklah benar. Oleh karena itu, dalam analisisnya, Said menggunakan pembacaan tekstual yang cermat untuk mengungkapkan dialektika antara karya atau "penulis individual" dengan formasi-kolektif yang kompleks tempat karya atau penulis tersebut memberikan sumbangannya.

Penjelasan di atas menunjukkan perlu adanya kontribusi yang kontinyu dari analisis kolonialisme (orientalisme) untuk menyediakan kerangka kerja bagi semua perspektif kolonialisme, terutama mengacu kepada medium-medium yang dipakai dalam kolonialisme itu sendiri. Salah satu bentuk medium itu adalah karya sastra, dalam hal ini, novel. Beberapa dekade belakangan ini, di bidang kesusastraan, muncul kecenderungan yang terus berkembang upaya untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kolonialisme, khususnya di negara bekas jajahan. Bagi masyarakat di negara-negara tersebut, tak dapat dipungkiri, poskolonial merupakan wacana yang menarik dan secara teoretis cukup menantang. Salah satu daya tarik wacana ini adalah kandungannya yang memiliki kaitan erat dengan kondisi diri mereka sebagai masyarakat poskolonial. Wacana ini membicarakan diri mereka, sisi-sisi kehidupan, baik itu yang positif maupun negatif. Seperti yang diungkapkan oleh Aschroft, Griffiths, dan Tiffin dalam *The Post-Colonial Studies Reader* (1995:iii), menariknya wacana poskolonial disebabkan wacana ini mencakup tema-tema kajian yang sangat luas, terentang dari politik, ideologi, agama, pendidikan, kesenian, kebudayaan, etnisitas, identitas, bahasa, dan sastra. Satu hal yang mempertemukan dan mengarakterisasi beragam tema kajian ini adalah bahwa semuanya dilatarbelakangi satu momen historis yang sama, yakni kolonialisme. Kolonialisme sebagai sebuah dampak, kemudian dapat digambarkan sebagai sebuah pemahaman, tentang dikuasainya sebuah budaya atau wilayah, dengan cara menitikbertakan sejauh mana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan, dengan mengandalkan kerja para spesialis untuk memahami pribumi, sehingga berhasil mendapatkan masukan materi-materi mengenai ketimuran, yang di era pascakolonial ini masih berlangsung.

Berdasarkan latar belakang masalah itu maka analisis wacana kolonial dalam kerangka poskolonialisme ini pembahasannya diarahkan pada wacana yang dirasa cukup

signifikan dan perlu diungkap dalam novel Max Havellar (selanjutnya disingkat *MH*). Adapun wacananya yaitu *posisi keberpihakan* yang dicurigai menjadi struktur mental dari sistem relasi wacana pengetahuan dan kekuasaan dalam kaitannya sebagai dampak kolonialisme. Wacana keberpihakan sebagai wacana kolonial, tidak lepas dari pendefinisian sekaligus pendeskreditan Timur sebagai objek, baik itu informasi yang mengarahkannya pada *penawaran* eksploitasi (bagi subjek Barat) ataupun representasi identitas yang terkesan memosisikannya pada kutub *inferior*. Diharapkan penelitian ini mampu membuka penyamaran ideologi imperialisme dalam posisinya sebagai konstitusi, khususnya tentang wacana kolonial yang ditampilkan lewat peribahasa kolonial, sejalan dengan eksposisinya yang seksama atas hubungan timbal balik antara pengetahuan dan kekuasaan kolonial dengan medium-mediumnya berdasarkan pendekatan poskolonial.

II TINJAUAN PUSTAKA

Definisi poskolonialisme dalam hal ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Dalam kaitannya dengan kolonialisme, Edward Said (dalam *Orientalism* - tahun 1978) menggarisbawahi bahwa pola-pola pengetahuan Barat yang terinstitusikan dalam lembaga orientalisme telah menempatkan Timur dalam suatu posisi yang tidak menguntungkan, marginal, terpinggirkan sebagai objek, bahkan juga sebagai “tumbal”. Orientalisme, dalam hal ini, berfungsi sebagai *mesin* yang membentuk representasi-representasi dan formasi yang erat kaitannya dengan wacana kolonialisme. Kolonialisme formal (*penjajahan secara fisik*) telah lama berakhir maka teori poskolonial, sebagai pendekatan kritis, dimanfaatkan sebagai resistensi teoritis terhadap amnesia yang membingungkan akibat penjajahan (kolonialisme). Dalam hal ini, efek kultural yang ditimbulkannya (kolonialisme) merupakan akibat yang membingungkan.

Poskolonialisme (Gandhi, 2001:6), sebagai sebuah disiplin dicurahkan guna menilikulang, mengingat, dan secara krusial menyelidiki hubungan antagonisme dan hasrat resiprokal antara penjajah (*coloniser*) dan yang dijajah (*colonized*). Fokusnya diarahkan pada godaan rentan tampilnya kembali kuasa kolonial, khususnya dalam formasi wacana yang membentuk pola-pola dominasi. Teori poskolonialisme bertujuan memperjelas bahwa teks-teks mampu mendestabilisasi dasar pikiran dan kekuatan kolonial hingga teks-teks itu mengedepankan efek-efek kolonialisme. Dalam teori poskolonialisme tidak disarankan adanya narasi utama namun menunjukkan rangkaian heterogenitas posisi subjek, bidang profesional, dan kegiatan kritis (Slemon, 1996:16). Serangkaian momen heterogen yang timbul dari proses historis itu, sifatnya tidak memutlakkan.

Poskolonialisme juga mengacu pada praktik-praktik yang terkait dalam usaha menggugat ‘hierarki sosial, struktur kekuasaan, dan wacana kolonialisme’ (Gilbert dan Tompkins, 1996:2). Menurut Loomba, teori poskolonialisme berkaitan dengan, atau dijelaskan bersama faktor-faktor ekonomi, sosial, kultur, dan historis (2003:15). Poskolonialisme dihubungkan pula dengan proses konstruksi budaya menuju budaya “putih global”. Kebudayaan kulit putih dipandang sebagai acuan perkembangan semua budaya, dan proses seperti itu tetap berlangsung meski penguasaan *kulit putih* atas sebuah negara berakhir (Sianipar, 2004:10).

Beberapa definisi di atas, jika dirujuk sebagai suatu strategi pembacaan, maka teori poskolonialisme dimaksudkan untuk: (a) mengkaji kondisi-kondisi masyarakat terjajah, pada elemen-elemen internal yang tersubordinasikan, yang masih tetap ada dan terjaga oleh eksklusi-eksklusi dalam masyarakat sipil poskolonial; (b) mengungkapkan representasi-representasi wacana dominan; dan (c) menunjukkan perbedaan dan retakan dalam hubungan kekuasaan, antara *yang mendominasi* dengan *yang didominasi*,

yang masih berlangsung di era pascakolonial. Dikaitkan dengan analisis karya sastra, berdasarkan hal tersebut, maka teori poskolonialisme dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai teori kritis yang dekonstruktif terhadap dampak-dampak kolonialisme, yang pemberdayaannya dimanfaatkan untuk mengungkapkan representasi wacana dominan (kolonial) yang secara internal masih.

III METODE

Pembahasan novel *MH* memanfaatkan *metode dekonstruksi*. Dekonstruksi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut cara membaca sebuah teks (sastra maupun filsafat) yang didasarkan pada pola “pluralitas makna”. Derrida, (dalam bukunya *Grammatology*, 1967) menjelaskan bahwa dekonstruksi memahami *tanda* sebagai ‘bekas’ (*trace*) yang tidak mempunyai nilai dan bobot sendiri tetapi menunjuk pada sesuatu (objek) yang lain. Dalam dekonstruksi tidak ada hubungan yang statis antara proposisi dengan realitas. Penanda-penanda mengambang terus-menerus dan sukar ditentukan dalam hubungannya dengan acuan ekstralinguistik (Fridolin, 1993: 28). Kodrat pemaknaan, tidak stabil secara esensial (Selden, 1991:75). Dekonstruksi, dengan demikian, berusaha membongkar dan mendefinisikan kembali teori-teori dan nilai-nilai pada poin di mana teks menutup-nutupi struktur gramatikalnya.

“Pembacaan-mendalam” dekonstruktif, menghancurkan pertahanan teks dan memperlihatkan serangkaian oposisi biner yang ditemukan “*tertulis*” dalam teks. Pada “kasus” oposisi biner identitas kata yang “diistimewakan” ini, tergantung pada peminggiran pengertian yang “tidak diistimewakan”; dan itu menunjukkan bahwa *keistimewaan* tersebut sebenarnya milik pengertian yang disubordinasikan. Dekonstruksi, dengan demikian, memeriksa unsur-unsur kecil (yang “tidak diistimewakan”) dalam momen yang tidak dapat (sulit) dipastikan, penggantian yang hampir tidak dapat dipersepsi, yang mungkin luput dari pengamatan pembaca. Selanjutnya unsur-unsur kecil tersebut dimanfaatkan sebagai momen yang berpotensi menghancurkan sistem yang melingkupinya.

Langkah-langkah metode dekonstruksi (terhadap oposisi biner) adalah sebagai berikut: a) meruntuhkan hierarki oposisi tersebut (oposisi biner), b) melakukan pembalikan, dengan memberikan tanda silang (x) pada posisi yang diistimewakan. Upaya yang dilakukan dalam metode dekonstruksi, dengan demikian, yaitu mencari dan menemukan teks-teks marginal yang menjanjikan, menyingkap, membongkar momen yang tidak dapat dipastikan dengan alat penanda positif, membalikkan hierarki yang ada, agar dapat diganti; membongkar agar dapat *membangun kembali* (bentuk baru) apa yang telah ditulis. Hal ini (metode dekonstruksi/dekonstruktif) berawal dari asumsi terhadap sistem pemikiran yang mengabaikan dan menindas pengaruh bahasa yang disruptif.

Berdasarkan pijakan penelitian ini, bahwa penguniversalan, penyisteman, dan penyebaran wacana sebagai upaya mencari ‘kebenaran abadi’ merupakan *mitos* para cendekiawan dan intelektual yang bisa menelantarkan subjek manusia (melalui pola yang terbentuk dalam representasi wacana yang dilahirkannya), mendominasi wilayah penyebarannya, yang diasumsikan sebagai praktik-praktik penindasan; maka wacana, dengan demikian, bukan lagi sekedar sekumpulan tanda, pernyataan, pemikiran, atau pun cara penyampaian pemikiran, tetapi juga berkenaan dengan aturan dan pengendalian yang memungkinkan diproduksinya pernyataan tentang eksistensi dan reproduksi sosial. Oleh karena itu, dekonstruksi, sebagai metode kritik dalam analisis poskolonial ini, berusaha membongkar sekaligus membalikkan representasi-representasi wacana dominan yang berkomitmen pada tema-tema historis dan kultural, yang memungkinkan terbukanya jalan bagi tampilnya kembali bentuk praktik-praktik kolonial.

IV PEMBAHASAN

3.1 *Max Havelaar*, Sastra kolonial dan Kontradiksi Keberpihakan

Salah satu gambaran sejarah kolonial antara dua bangsa, *penjajah* dan *terjajah*, dapat dilihat dalam posisi antara Belanda dan Indonesia. Seperti pada umumnya, dalam wacana kolonialisme ini, terjadi bentuk-bentuk hubungan yang sifatnya berat sebelah, di mana penjajah yang menerapkan sistem imperialisme berusaha mengeruk keuntungan sebanya-banyak dari negara yang dikuasainya, sebaliknya bangsa yang terjajah menjalani nasibnya sebagai kaum tertindas dari proyek-proyek imperialisasi tersebut. Ruang dan tempat yang menyediakan waktunya untuk melukiskan permasalahan kolonisasi Belanda di Indonesia, jelas dan gamblang, dapat dilihat pada fenomena yang disajikan oleh pengarang-pengarang sastra di antara kedua bangsa tersebut lewat karya-karyanya.

Kesusastraan kolonial, secara tematik, sering mengungkapkan permasalahan kolonialisme. Pertama-tama, tentang kelangsungan bangsa-bangsa penjajah yang hidup di negara-negara koloninya, berkaitan dengan peran pribumi sebagai entitas yang perannya termarginalkan dalam hubungan kolonisasi tersebut. penjajah dan yang dijajah hidup di jalur hierarkinya masing-masing. Yang kemudian menjadi dominan adalah terbentuknya pemisahan antara “kami” terhadap “mereka”, “majikan” terhadap “kawula”, dan lain-lain. Di lain pihak, digambarkan pula kerakusan dan perilaku kasar yang ditunjukkan oleh kaum sebangsa terhadap pihak yang ditaklukkan di bawah kekuasaan mereka. Perlu dipahami bahwa tidak sedikit sastrawan yang menulis karyanya, ketika proses penjajahan itu sedang berlangsung. Menariknya, pada masa penjajahan Belanda itu berlangsung, terdapat pandangan dan sikap yang berlawanan pada pengarang-pengarang Hindia-Belanda, tidak saja dalam menghadapi keadaan masyarakat colonial seluruhnya, melainkan juga dalam memilih pihak di antara lapisan atau golongan yang dipisahkan oleh garis batas warna dan perbedaan bangsa.

Salah satu karya yang berpredikat seperti itu adalah *Max Haevlaar* karya Multatuli. Selain menampilkan bentuk-bentuk romantisasi, karya ini merupakan tulisan pengarangnya yang berkenaan dengan konflik politik Belanda tentang aturan dan kebijaksanaan yang diterapkan pada tanah jajahannya, Indonesia. Namun demikian, meskipun berasal dari Belanda, Multatuli (yang dipercaya sebagai Douwes Dekker, asisten residan Lebak, diwakilkan dengan tokoh Max Havelaar) tidak memberikan tempatnya untuk memihak entitas penjajah (Belanda), negeri asalnya, dalam karya tersebut tersebut. Karya ini lebih memiliki unsur subyektif yang kuat, yaitu cenderung menyuarakan sikap dan pandangan pribadi pengarangnya secara langsung. Max Havelaar, menggambarkan keberpihakan Multatuli terhadap nasib dan penderitaan kehidupan batin bangsa Indonesia (terutama Jawa).

“Buku ini isinya aneka macam, tidak beraturan, pengarangnya mengejar sensasi, gayanya buruk, tidak nampak keahlian; ... tidak ada bakat, tidak ada metode.” ... Baik, baik, ... semuanya itu benar, ... tapi orang Jawa dianiaya! (MH:347).

Dalam pengantarnya di bab pendahuluan buku ini (Max Havelaar), Gerard Termorshuizen (MH:VIII) menyatakan bahwa kritikan dan tulisan tentang pembelaan terhadap bangsa terjajah selalu dapat ditemukan dan disampaikan di antaranya oleh kaum pendatang. Penulisan itu selain berkat posisi kemasyarakatan mereka yang kerap sangat berpengaruh, juga karena kekuatan dari isi dan pesan yang terdapat dalam tulisan-tulisan tersebut, yang dalam jangka waktu jaman penjajahan tersebut berhasil memberikan sumbangan yang tidak dapat diabaikan terhadap humanisasi rezim-rezim

kolonial yang ada. Hal itu menunjukkan bahwa pada saat memberikan aksentuasi terhadap kenyataan menyedihkan dari kolonialisme, mereka sesungguhnya mewakili suara hati nurani pribadi maupun masyarakat yang tertindas. Penggambaran ini jelas terlihat dalam **Max Havelaar** karya Multatuli yang terbit pada tahun 1860 itu. Karya ini (Multatuli) menggugat dengan tajam bentuk-bentuk ketidakadilan dan penderitaan yang menimpa penduduk bumiputra di wilayah Lebah (Jawa) khususnya, dan di Indonesia pada umumnya (Hindia-Belanda waktu itu). Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat itu, masyarakat Jawa diperas. Di bawah sistem Tanam paksa, penduduk harus menyediakan seperlima bagian tanahnya kepada pemerintah Belanda.

Karakteristik isi cerita yang ditulis pengarangnya, Multatuli, menggolongkan karya ini sebagai karya sastra Hindia Belanda. Subagio Sastrowardoyo dalam bukunya: **Sastra Hindia Belanda dan Kita** (1983:11) menjelaskan bahwa Sastra Hindia Belanda adalah rumpun kesusastraan di dalam bahasa Belanda yang berpokok pada kehidupan di negeri jajahan Hindia Belanda, ditulis oleh orang Belanda terutama, dan oleh orang-orang Indo, baik yang keturunan Belanda maupun yang keturunan Eropa lainnya. Dalam sastra Hindia-Belanda, dapat kita peroleh gambaran kehidupan colonial yang ditangkap oleh pengarang-pengarangnya di dalam masa yang lebih bersamaan dengan lama waktu bangsa Belanda berkuasa di Indonesia.

Rumah pembesar pada akhirnya digunakan untuk membahas permasalahan penyalahgunaan dan ketidakadilan terhadap rakyat kecil. Bagaimana residen memanggil bupati atau demang mengerjakan pemeliharaan rumah dengan mengerahkan pekerjaan rodi. Pejabat bumiputera yang dipanggil dengan cepat memenuhi permintaan residen karena dengan demikian bila tiba waktunya mereka melakukan hal yang sama (memakai pekerja rodi) residen akan sulit menegur mereka. Havelaar tidak mau menyalahgunakan rakyat dan akibatnya Max kecil tidak dapat lagi bermain-main di pekarangan luas mereka karena adanya ular di kerimbunan tanaman (MH: 216 -217).

Data di atas menunjukkan tidak saja bagian yang mengungkapkan contoh-contoh masalah penyalahgunaan praktik kolonial, tetapi juga menyiratkan kritik MH terhadap pemerintahan kolonial. Selain itu, MH sebagai karya sastra, tidak saja menyuarakan tuntutan atas keadilan, tetapi sekaligus menjadikannya sebagai karya yang secara tematiknya menentang karya konvensional saat itu. Karya ini mengungkap orisinalitas pengalaman-pengalaman kolonial, yang belum tersentuh pemikiran-pemikiran ilmiah yang ketat metodik dan sistematiknya. Sehingga, bisa dikatakan bahwa karya tersebut memuat kenyataan-kenyataan sejarah kolonial yang berlangsung saat itu.

Multatuli (Douwes Dekker), yang perannya dalam karya **Max Havelaar** terwakili dalam tokoh Max Havelaar, adalah pengarang Belanda pertama yang berhasil melepaskan diri dari tradisi dan konvensi kesusastraan. Eksistensinya menggambarkan individu yang mempunyai perasaan kemanusiaan berjuang melawan kepentingan diri kolektivitas, terutama motif-motif manusiawi. Namun demikian, meski lewat upaya unkonvensional, MH masih belum bisa melepaskan diri sepenuhnya sebagai karya yang berciri kerja kaum orientalis, di mana Timur senantiasa disuarakan dalam tanda-tanda ketimurannya, sehingga isinya secara keseluruhan tidak mengarah pada tuntutan atas kemerdekaan, tetapi lebih pada upaya hegemonik perbaruan mesin kerja kolonial. Sifat kontradiktif ini sekaligus menempatkan MH sebagai karya yang di satu sisi seolah-

olah berpihak kepada kaum terjajah, namun secara bawah sadar justru mempertegas kelanjutan penjajahan itu sendiri: *Max kecil tidak dapat lagi bermain-main di pekarangan luas mereka karena adanya ular di kerimbunan tanaman.*

3.2 *Max Havelaar*, Gugatan dalam Tubuh Kolonialisme

Membaca *Max Havelaar* karya Multatuli adalah mengingatkan kembali masa silam atau sejarah kolonial yang terjadi di Indonesia pada masa pendudukan Belanda, yang berlangsung selama kisaran tiga setengah abad. Lebih mengkerucut lagi, roman ini menggambarkan kisah perjuangan seorang Asisten Residen, yang berusaha untuk menghapuskan ketimpangan yang dalam yaitu hubungan atau relasi yang tidak manusiawi antara penguasa dan taklukannya. *Max Havelaar*, bisa dikatakan adalah sebuah otobiografi, yaitu pengalaman-pengalaman Multatuli atau Douwes Dekker di Lebak semasa menjabat sebagai Asisten Residen. Dalam karya ini, terdapat tiga segmen cerita yang disampaikan oleh pengarangnya, di antaranya yaitu: 1) pengalaman Havelaar menjadi Asisten Residen di Lebak; 2) mengenai pedagang (makelar) kopi Droogstoppel; dan 3) mengenai kisah Saijah dan Adinda di desa Badur. Meskipun masing-masing cerita berdiri sendiri, tetapi pangarangnya dengan baik mampu mempertalikan ketiganya menjadi bagian-bagaian yang berlapis dan berkaitan dengan ketat dan utuh. Selain itu, yang tidak bisa diabaikan begitu saja yaitu penampilan “tiba-tiba” pengarang di bagian akhir cerita, yang menunjukkan sikapnya secara langsung tentang isi karya yang dituliskannya tersebut.

Seperti dipahami pada bab pengantar sebelumnya, bahwa kontribusi dari analisis kolonialisme (orientalisme) adalah menyediakan kerangka kerja, menunjukkan 1) bahwa semua perspektif kolonialisme harus mengacu kepada medium-medium yang dipakai dalam kolonialisme itu sendiri, bahwa semua teks-teks kolonialisme tidak hanya dilihat sebagai dokumentasi atau kumpulan bukti-bukti belaka, dan 2) bahwa keterlibatan kolonialisme tidak hanya dalam aktivitas militer dan ekonomi saja tapi justru lewat bentuk-bentuk pengetahuanlah, kolonialisme itu ditegakkan, maka pada analisis kali ini akan dibahas: bagaimana kuasa-kuasa kolonial mampu memperoleh kendali yang sangat besar atas wilayah koloninya. Pertanyaan ini berkenaan dengan kekuasaan Belanda di Indonesia (Hindia-Belanda), yang termuat dalam roman *Max Havelaar*.

Kecenderungan dari semua pendefinisian kebudayaan secara nasional menunjukkan pesan yang implisit bahwa di situ termuat suatu aspirasi yang berkenaan dengan aspek-aspek kekuasaan, untuk berdaulat, dan bentuk-bentuk mendominasi. Demikian pula halnya, ketika Belanda mampu menguasai hampir seluruh wilayah di tanah air (Indonesia), kebijaksanaan yang diterapkan sebagai sistem pemerintahan colonial, secara langsung maupun tidak langsung merubah wacana budaya yang ada pada negara koloninya. Realitas ini dapat dilihat dari berubahnya sistem kekuasaan yang tercipta dalam kehidupan politik saat itu, yaitu yang awalnya kekuasaan tunggal pribumi, antara raja (Priyayi) terhadap rakyatnya (Kawula), pada sistem kepemimpinan atau kekuasaan yang bersifat dualistis. Sistem pemerintahan ini (dualistis) artinya adanya percampuran antara pemerintahan baru yaitu Belanda (kolonial) dan priyayi, yaitu raja atau kepala adat.

Aturan ini, pemerintahan dualistis, memposisikan rakyat tidak langsung takluk kepada pejabat pemerintahan Hindia-Belanda, tetapi tetap kepada pemimpin mereka sebelumnya yaitu raja atau kepala adat. Di lain pihak, tugas pejabat pemerintahan Hindia-Belanda hanya mengawasi dan melakukan control terhadap tugas-tugas dan kewajiban para raja, sebagai pihak yang secara langsung takluk dan mengakui kekuasaan Belanda dengan berbagai konsekuensi wilayah taklukan. Hal ini adalah salah policy yang diterapkan oleh pemerintahan colonial Belanda saat itu di Indonesia. Jika ditilik pada

roman **Max Havelaar** karya Multatuli, wacana kekuasaan yang bisa diambil sebagai pengaruh policy atau kebijaksanaan tersebut, yaitu kecenderungan memanfaatkan rakyat Indonesia sebagai modal berharga untuk jalannya sistem colonial (imperial). Kecenderungan tersebut dapat dilihat pada bagian pidato Havelaar saat perkenalannya sebagai Asiten Residan yang baru berikut.

Sebab itu, saya akan memperhatikan orang-orang di antara tuan-tuan yang unggul dalam kebajikan, dalam usaha saya supaya lebih baik dari sekarang. Rakyat tuan-tuan memiliki sawah-sawah di lembah-lembah dan ada pula sawah-sawah di gunung-gunung. dan justru itulah sebabnya kita bersyukur kepada Allah, bahwa Ia memberi kita kekuasaan untuk bekerja di sini.Kepala-kepala negeri Lebak, kita sering melakukan kesalahan-kesalahan dan negeri kita miskin, karena kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan. banyak orang yang sebenarnya anak kita meninggalkan Lebak untuk mengembara. dan mereka mati dengan menyedihkan karena di sana ada kekuasaan pemerintah, yang mengalahkan pemberontak. percayalah, siapa-siapa yang tersesat, saya akan mengadilinya dengan lunak. (MH:112-122).

Pidato Havelaar tersebut secara langsung menunjukkan adanya otoritas colonial, tentang bagaimana operasi-operasi kekuasaan itu kemudian berjalan, dan itu merupakan bentuk-bentuk ideologis penjajah terhadap struktur wilayah jajahannya. Belanda memandang bangsa Indoensia sebagai “anak” yang harus dibimbing oleh “orangtua”nya. Sebagai bagian dari otoritas kelembagaan colonial, pejabat pemerintahan, Asisten Residen Max Havelaar merupakan perwakilan yang ditunjukkan oleh “pusat”, untuk menjalankan sistem kekuasaan Belanda di wilayah Lebak. Pada pidato perkenalannya dengan para pejabat pemerintahan yang berada di wilayah kekuasaannya, Havelaar memberikan garis batas dan ketentuan tentang bagaimana sebuah aturan kekuasaan itu berjalan. Pemerintahan Belanda, dengan sistem imperialisnya, tidak mengharapkan kerja seorang Havelaar tidak sesuai dengan sistem yang ada. Dan dengan kekuasaan yang dimilikinya, Havelaar memberikan perintah agar para bawahannya itu tidak “tersesat”, agar mereka tidak “diadili”. Sebagaimana posisinya sebagai wilayah jajahan dengan posisi yang lebih rendah, Bupati Lebak, selaku saudara muda dan penguasa pribumi, tunduk pada ketentuan tersebut.

“saya tidak akan menghukum berat dalam kesalahan-kesalahan pekerjaan atau kelalaian biasa. Hanya di mana kelalaian menjadi kebiasaan, saya akan mencegahnya. itu tidak akan terjadi bukan, tuan Adipati? ... “O tidak tuan asisten residen, itu tidak akan terjadi di Lebak.” (MH:122)

Foucault menjelaskan bahwa struktur-struktur dominan masyarakat barat mereproduksi diri mereka dengan bekerja diam-diam, bukannya secara terang-terangan terhadap subjek manusia dan terutama tubuh manusia. Dalam hal ini, manusia menyerap sistem-sistem penindasan dan menirunya dengan menuruti gagasan tertentu tentang apa yang normal dan apa yang menyimpang. Gagasan bahwa masyarakat “timur” (terjajah) yang dalam hal ini Lebak (Indonesia), adalah sebagai entitas yang berbeda dengan mereka (penjajah), maka selanjutnya dalam proses yang berhubungan dengannya (terjajah), pemerintahan colonial mengaturnya melalui lembaga-lembaga dan “aturan-aturan” ideologis tertentu. Kekuasaan dengan demikian dapat dipahami seperti pendapat Foucault bahwa kekuasaan itu berasal dari berbagai macam arah, dari mana-mana.

Namun demikian, sistem kekuasaan dualistis yang diterapkan oleh Belanda, ternyata tidak menunjukkan adanya suatu jalinan sosial yang baik antara Belanda dan Pribumi.

Meskipun lembaga-lembaga dan berbagai macam formasi wacana yang ditampilkan oleh Belanda bertujuan untuk mencapai hasil yang baik, kecenderungan hubungan keduanya tetap menimbulkan konflik, yaitu ketika raja atau kepala adat diberikan wewenang penuh untuk mengatur rakyatnya. Havelaar sebagai Asisten Residen, sebelum memangku jabatannya itu, telah memiliki informasi tersendiri tentang suasana Lebak dan kondisi masyarakat yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah bahwa bupati Lebak, Raden Adipati Kerta Nata Negara dan menantunya, Demang Parangkujang, Raden Wira Kusuma telah melakukan praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan kebijaksanaan colonial. Berawal dari kecurigaan inilah, kemudian muncul konflik antara Havelaar dengan atasannya.

Sikap menentang yang dilakukan oleh Havelaar ini disebabkan bahwa pada kenyataannya pemerintahan dianggapnya tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap sikap sewenang-wenang priyayi pribumi terhadap kawulanya. Jelas bahwa dalam hal ini, Havelaar tidak begitu memahami kebijakan politik (kekuasaan) Belanda di Lebak yang bersifat dualistis tersebut. Havelaar dianggap terlalu mencampuri urusan “adat” yang terdapat dalam wilayah pribumi, dan sikapnya yang melangkahi dan menentang atasan dipandang sebagai tindakan yang tidak semestinya bagi seorang pejabat pemerintahan. Namun demikian, kekukuhan Havelaar tetaplah pada prinsipnya, bahwa ia ingin menentang sistem atau bentuk kekuasaan seperti itu. Kenyataan yang muncul kemudian, tuduhan atau kecurigaan Havelaar akhirnya sebagian terbukti. Hal yang selanjutnya merubah sistem kekuasaan Belanda di tanah air dan dihapuskannya sistem tanam paksa.

Pemahaman yang perlu diambil disini bahwa Havelaar adalah korban dari suatu mentalitas birokratis, di mana kepentingan diri diutamakan. Namun demikian, meski Havelaar dengan kesadaran norma etikanya yang modern, terbentur pada pergaulan hidup yang tidak cukup dikenal dan dipahaminya, yaitu kebijakan pemerintahan (kekuasaan) Belanda dan tatanan hukum adat di Lebak, ia tetap teguh menunjukkan bahwa kekuasaan telah disalahgunakan. Hal itu juga terbukti pada sebuah tulisannya, Ideen (1862) bahwa tiap kekuasaan, apakah itu kekuasaan agama, adat istiadat ataupun politik, seringkali berdasarkan kepentingan diri, bela diri dan kemunafikan.

V SIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya disimpulkan, novel *Max Havelaar* sebagai karya sastra adalah bagian dari lembaga atau sistem pendidikan kolonial (agen). Karya ini mampu memberikan kontribusi pengetahuan yang berarti, salah satunya yaitu pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya proses kolonialisme itu berlangsung, khususnya penjajahan Belanda di Indonesia. Karya ini juga memberikan pemahaman, bahwa literatur (karya sastra) merupakan sarana penting untuk membalikkan dan menentang sarana-sarana dominan dari penggambaran dan ideologi-ideologi kolonial. Dalam hal ini persoalan kontradiktif menjadi kuat. Posisi keberpihakan dalam wacana kolonial menjadi tanda bagi kontradiksi tersebut.

Novel bagaimanapun juga adalah bentuk modern karya sastra, yang fungsi mediumnya menjadi pengantar tidak saja bagi informasi ilmiah atau non ilmiah, fakta atau fiksi, bahkan wacana tentang penjajah dan terjajah. Kehadiran *Max Havelaar* sebagai sebuah novel tidak lebih maknanya sebagai agen. Agen dimaksud dalam hal inilah yang bermakna kontradiktif. Di satu sisi, secara mayoritas novel ini membela kaum terjajah.

Hanya saja pembelaan itu sebatas ketidakadilan dalam kondisi kolonialitas. Artinya, secara fakta novel ini justru menyerukan upaya bagi pemerintah kerajaan Belanda untuk tetap menguatkan status quonya sebagai penjajah, dengan cara-cara yang lebih beradab. Diyakini kemudian, bahwa novel **Max Havelaar** ini, dengan tujuan yang terakhir tadi, menjadikannya sebagai karya hegemonik dalam persoalan kolonialitas, khususnya untuk mempertahankan posisi penjajah dan terjajah. Bukan lagi membela kaum pribumi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Pamela. 2004. *Reading Matters: An Examination of Plurality of Meaning in Indonesia Fiction 1980-1995*. Diterjemahkan dalam judul: *Membaca dan Membaca Lagi: /Re/interpretasi Fiksi Indonesia 1980-1995* oleh Bakdi Soemanto. Magelang: Indonesiaterra;
- Ashcrof, Bill, Gareth Tiffins. 2003. *Menelanjangi Kuasa Bahasa* Diterjemahkan dari *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Postcolonial Literature* oleh Fati Soewandi. Yogyakarta : Penerbit Qalam
- Cavallaro, Dani. 2004. *Critical and Cultural theory; Thematic Variations*. Diterjemahkan dalam judul: *Teori Kritis dan Teori Budaya* oleh Laily Rahmawati. Yogyakarta: Niagara;
- Foucault, Michel. 1977. *The Political Function of the Intellectual: Radical Philosophy*. Brighton: Harvester;
- Fridolin, Iwan. 1993. *Kita Gesek Biola Sementara Rumah Kita Terbakar*. Prisma edisi no. 1 thn. XXII. Jakarta: LP3ES;
- Gandhi, Leela. 1998. *Postcolonial Theory A Critical Introduction*. London: Allen and Unwin. Diterjemahkan dalam judul: *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat - 2001*. Yogyakarta: Qalam;
- Gilbert, Helen dan Joanne Tompkins. 1996. *Post-Colonial Drama: Theory, Practice, Politics*. London and New York: Routledge;
- Loomba, Ania. 2000. *Colonialism/Postcolonialism*. New York: Routledge. Diterjemahkan dalam judul; *Kolonialisme/Pascakolonialisme*, 2003, oleh Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: Bentang Budaya;
- Multatuli. 1979. *Max Havelaar*. Edisi Amstelpaperback. Ede : L.J. Veen.
- Said, Edward W. 1979. *Orientalism*. New York: Vintage Books. Diterjemahkan dalam judul: *Orientalisme - 2001*, oleh Asep Hikmat. Bandung: Pustaka;
- Selden, Raman. 1991. *Panduan Teori Membaca Masa Kini*. Diterjemahkan oleh Rachmat Djoko Pradopo. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Sianipar, Gading. 2004. *Hermeneutika Pascakolonial*. Yogyakarta: Kanisius;